PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13, Number 1, October 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR MODERN LIMBOTO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN GORONTALO

POLICY IMPLEMENTATION OF LIMBOTO MODERN MARKET DEVELOPMENT IN IMPROVING LOCAL COMMUNITY ECONOMIC WELFARE IN GORONTALO REGENCY

Marlin Ina [1], Dewi Walahe [2], Lisnawaty Patunai Pauweni [3], Sarfan Tabo [4], Jefri Polinggapo [5]

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo, Gorontalo Indonesia

Corresponding author: marlininamarlin@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted:
July 1, 2026

Review:
September 08, 2026

Accepted:
October 08, 2026

Available online:
October 31, 2026

Article Citation (APA):
Ina, M., Walahe, D., Pauweni, L., Tabo, S., & Polinggapo, J. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR MODERN LIMBOTO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN GORONTALO. *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 54-63. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.763

DOI:
https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.763

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Pasar Modern Limboto dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Gorontalo. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III, penelitian ini mengkaji empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada tahap perkembangan yang positif namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Komunikasi kebijakan terkendala oleh 'kebocoran informasi' yang mengakibatkan kesenjangan pemahaman di kalangan pedagang. Investasi fisik senilai Rp56 miliar dari dana PEN terealisasi, namun terdapat 'kesenjangan hardware-software' pada aspek SDM pengelola dan sistem informasi. Konsep 'disposisi pasif' yang diidentifikasi dalam penelitian ini dibentuk oleh trauma historis pedagang pascakebakaran 2018 memperkaya tipologi disposisi dalam Model Edward III. Koordinasi birokrasi yang belum optimal menyebabkan lambatnya respons terhadap permasalahan operasional. Meskipun demikian, dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi mulai terlihat: pedagang aktif mencatat kenaikan omzet 15–25%, terdapat penciptaan lapangan kerja baru, dan multiplier effect terhadap ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi dua arah, pengembangan sumber daya non-fisik, pendampingan psikososial bagi pedagang, dan reformasi koordinasi birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Modern, Kesejahteraan Ekonomi, Edward III, Gorontalo

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Limboto Modern Market development policy in improving the economic welfare of local communities in Gorontalo Regency. Using a descriptive qualitative approach with George C. Edward III's Policy Implementation Model as the analytical framework, this research examines four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews with 20 key informants, participatory

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

observation, and documentation studies. Findings indicate that policy implementation is in a positive developmental stage but still faces several challenges. Policy communication is hampered by 'information leakage, resulting in knowledge gaps among traders. A physical investment of IDR 56 billion from the National Economic Recovery (PEN) fund has been realized, yet a 'hardware-software gap' exists in terms of management human resources and information systems. The concept of 'passive disposition' shaped by traders' historical trauma following the 2018 fire enriches the disposition typology in Edward III's model. Suboptimal bureaucratic coordination leads to slow responses to operational problems. Nevertheless, positive impacts on economic welfare are emerging: active traders report revenue increases of 15–25%, new employment is being created, and multiplier effects on the local economy are observed. This study recommends strengthening two-way communication, developing non-physical resources, providing psychosocial support for traders, and reforming bureaucratic coordination mechanisms.

Keywords: *Policy Implementation, Modern Market, Economic Welfare, Edward III, Gorontalo*

PENDAHULUAN

Pembangunan pasar modern merupakan fenomena yang berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses perdagangan yang lebih higienis, nyaman, dan terstandar. Pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan penguatan ekonomi lokal mendorong daerah untuk mengembangkan infrastruktur pasar yang mampu mengakomodasi perubahan pola konsumsi masyarakat (Statistik, 2022).

Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan Pasar Modern Limboto yang diresmikan pada 23 September 2023 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pasar yang berlokasi di Jalan Baso Bobihoe ini dibangun dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp56 miliar, menggantikan Shopping Center Limboto yang terbakar pada tahun 2018. Pasar ini dirancang sebagai pusat perdagangan terintegrasi yang tidak hanya memfasilitasi aktivitas jual beli, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya UMKM daerah.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini membutuhkan evaluasi mendalam. Data lapangan menunjukkan adanya problematika implementasi yang mencakup: (1) kapasitas adaptasi pedagang yang belum memadai terhadap sistem pengelolaan pasar kontemporer; (2) minimnya diseminasi informasi kepada pelaku usaha; (3) lemahnya sinergi koordinatif antarinstansi pemerintah; serta (4) fenomena paradoks berupa intensifikasi kegiatan perekonomian yang diiringi eskalasi beban operasional dan potensi eksklusivitas terhadap pedagang berskala kecil. Kondisi ketiga di atas sejalan dengan temuan bahwa efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah sering kali terkendala oleh rendahnya kapasitas sumber daya aparatur (Tabo, 2018), yang dalam konteks Pasar Modern Limboto tercermin dari belum optimalnya sinergi koordinatif antarinstansi pengelola.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti (Engkus, 2020),(Adityanto & Paselle, 2024), dan (Riza & Aditya, 2021) umumnya berfokus pada revitalisasi pasar tradisional yang telah lama beroperasi, sehingga dinamika yang dikaji lebih banyak berkaitan dengan resistensi terhadap perubahan pada sistem yang sudah mapan. Kajian mengenai implementasi kebijakan pembangunan pasar modern yang baru diresmikan (*new development*) masih sangat terbatas, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur, yang memiliki karakteristik kapasitas kelembagaan daerah dan pola koordinasi antarinstansi yang berbeda dari wilayah yang telah banyak diteliti. Selain itu, studi terdahulu umumnya menyoroti implementasi kebijakan secara linear, sementara fenomena paradoks berupa intensifikasi

aktivitas ekonomi yang beriringan dengan eskalasi beban operasional dan potensi eksklusi pedagang kecil belum banyak dibedah secara spesifik dalam kerangka implementasi kebijakan. Konteks pembiayaan melalui skema PEN pascabencana kebakaran turut menjadikan kasus ini berbeda dari pembangunan pasar yang bersifat rutin. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaplikasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III pada studi kasus pembangunan pasar modern baru yang dibiayai skema Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Gorontalo sebuah konteks wilayah Indonesia Timur yang masih minim dikaji. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada dinamika revitalisasi pasar yang telah beroperasi lama, penelitian ini mengungkap dinamika implementasi kebijakan pada fase transisi awal, meliputi proses adaptasi pedagang terhadap sistem pengelolaan yang sepenuhnya baru, serta mengidentifikasi fenomena paradoks intensifikasi ekonomi yang diiringi eskalasi beban operasional dan risiko eksklusi pedagang kecil, sebagai kontribusi konseptual dalam kajian implementasi kebijakan pasar modern di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menawarkan kerangka analisis sistematis melalui empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pembangunan Pasar Modern Limboto; (2) mengidentifikasi faktor determinan pelaksanaan kebijakan; dan (3) menganalisis dampak pembangunan pasar modern terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Secara eksplisit, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penerapan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (Edward, 1980) pada kasus pembangunan pasar modern baru (new development) yang dibiayai skema Pemulihan Ekonomi Nasional pascabencana kebakaran, konteks yang belum banyak dikaji pada penelitian implementasi kebijakan pasar sebelumnya. Kedua, identifikasi fenomena paradoks intensifikasi aktivitas ekonomi yang beriringan dengan eskalasi beban operasional dan potensi eksklusi pedagang kecil, yang belum banyak dibedah secara spesifik dalam kerangka Edward III. Ketiga, lokus penelitian di Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah Indonesia Timur yang masih minim dikaji dalam literatur implementasi kebijakan pembangunan pasar modern. Adapun gap penelitian yang diidentifikasi adalah masih minimnya kajian empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan pada fase transisi awal pasar modern yang baru diresmikan, khususnya terkait proses adaptasi pedagang terhadap sistem pengelolaan yang sepenuhnya baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih karena kemampuannya menangkap kompleksitas fenomena sosial, khususnya dalam memahami proses implementasi kebijakan yang melibatkan interaksi multi-aktor dalam konteks yang dinamis (Fadli, n.d.). Lokasi penelitian adalah Pasar Modern Limboto (PASMOLIM), Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 20 informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria keterlibatan langsung dalam proses implementasi kebijakan. Informan tersebut mencakup unsur birokrasi (Kepala Disperindag dan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar), unsur pengelola teknis pasar, unsur pedagang yang dibedakan antara

pedagang lama yang mengalami proses relokasi dari Shopping Center Limboto dan pedagang baru yang langsung beroperasi di sistem pengelolaan baru serta unsur pengguna, yaitu konsumen dan pelaku UMKM. Pembedaan kategori informan ini bertujuan untuk menangkap keragaman perspektif dan pengalaman adaptasi terhadap kebijakan yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti kebijakan pembangunan Pasar Modern Limboto, laporan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), data statistik pedagang dan retribusi pasar, notulen rapat koordinasi antarinstansi, serta pemberitaan media terkait peresmian pasar, yang digunakan untuk memperkuat dan melakukan verifikasi silang terhadap temuan lapangan.

Pengumpulan data dilakukan secara triangulatif melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan empat variabel model Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Wawancara direkam atas persetujuan informan, ditranskrip secara verbatim, dan dilengkapi dengan catatan lapangan untuk mendokumentasikan konteks nonverbal yang relevan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan terhadap aktivitas operasional harian pasar, mencakup pola interaksi pedagang dengan sistem pengelolaan baru, efektivitas sosialisasi kebijakan di lapangan, serta dinamika koordinasi antara pengelola pasar dan instansi terkait, yang dicatat melalui lembar observasi terstruktur dan didokumentasikan secara visual. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan atas kebijakan resmi, laporan instansi terkait, serta arsip media untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif agar dapat saling memperkuat dan mengisi kekurangan data antarteknik, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Secara lebih rinci, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Wawancara mendalam dengan 20 informan kunci berlangsung selama 45–90 menit per sesi, dilaksanakan pada periode evaluasi enam bulan pascaoperasional Pasar Modern Limboto, dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan empat indikator Model Edward III. Observasi partisipatif dilakukan selama empat minggu pada hari pasar aktif maupun hari sepi, menggunakan lembar observasi terstruktur yang mencatat pola interaksi pedagang-pengelola, kepatuhan terhadap SOP, dan dinamika koordinasi antarinstansi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Disperindag Kabupaten Gorontalo, laporan realisasi anggaran PEN, data statistik pedagang dan retribusi pasar tahun 2023–2026, notulen rapat koordinasi antarinstansi, serta arsip pemberitaan media lokal terkait peresmian dan operasional pasar. Adapun teknik analisis data dilakukan secara manual melalui pengodean terbuka (open coding) atas transkrip wawancara dan catatan lapangan, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tema sesuai empat variabel Edward III (axial coding), sebelum ditarik pola hubungan antartema (selective coding). Proses coding dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk meningkatkan konsistensi interpretasi, dengan perbedaan penafsiran didiskusikan hingga tercapai kesepakatan (intercoder agreement).

Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) yang diadaptasi dengan model interaktif (Miles & Huberman, 1994), meliputi tiga tahapan yang berlangsung secara siklis. Tahap pertama, reduksi data, dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data mentah baik transkrip wawancara, catatan observasi, maupun dokumen pada informasi yang relevan dengan empat variabel Edward III, melalui proses pengodean (*coding*) untuk mengidentifikasi pola dan mengelompokkannya ke dalam

kategori tema awal. Tahap kedua, penyajian data, dilakukan dengan menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif deskriptif dan matriks tema berdasarkan keempat variabel tersebut, guna memudahkan identifikasi pola hubungan antarvariabel. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara iteratif melalui pengecekan silang antarsumber data hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai kategori informan, dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pasar Modern Limboto

Pasar Modern Limboto merupakan transformasi dari Shopping Center Limboto yang terbakar pada 2 Maret 2018. Peletakan simbolik pembangunan dilakukan pada Juli 2022 dan pasar diresmikan pada 23 September 2023. Bangunan berarsitektur semi-mall ini menyediakan 161 petak kios berstandar, fasilitas sanitasi modern, area parkir, musala, dan pusat kuliner. Dari sekitar 400 pendaftar awal, 200 pedagang terdaftar menempati pasar, termasuk 40 pedagang eks-Shopping Centre. Namun pada periode evaluasi, masih terdapat sekitar 50 petak yang belum aktif.

Implementasi Kebijakan: Analisis Empat Variabel Edward III

1. Komunikasi Kebijakan

Dimensi komunikasi menunjukkan paradoks antara sosialisasi formal dan pemahaman substantif. Pemerintah daerah telah melaksanakan rangkaian sosialisasi formal rapat koordinasi, pengumuman media lokal, pertemuan asosiasi pedagang namun efektivitasnya belum merata dan optimal. Wawancara dengan pedagang mengungkap bahwa informasi sering diterima secara tidak langsung daripada dari sumber resmi pemerintah. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mengakui: "Ada gap antara informasi yang kami sampaikan dari tingkat dinas dengan pemahaman yang sampai ke pedagang di lapangan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum berjalan sepenuhnya optimal." Fenomena yang diidentifikasi sebagai 'kebocoran komunikasi' (communication leakage) ini berdampak pada rendahnya kesiapan sebagian pedagang dalam beradaptasi dengan sistem pasar modern. Inkonsistensi juga terjadi ketika kebijakan diskon sewa 50% bagi UMKM baru diberlakukan pada April 2025 sekitar 18 bulan setelah peresmian menciptakan ketidakpastian di kalangan pedagang bermodal kecil.

2. Sumber Daya

Analisis sumber daya menghasilkan temuan yang dikonseptualisasikan sebagai 'kesenjangan hardware-software'. Dana PEN sebesar Rp56 miliar berhasil mewujudkan infrastruktur fisik berkategori semi-mall yang representatif. Namun investasi pada komponen non-fisik kapasitas SDM pengelola, sistem informasi manajemen, program pemberdayaan pedagang, dan fasilitasi akses permodalan tidak proporsional dengan skala investasi fisik. Kondisi pengelola pasar yang mengelola fasilitas skala besar tanpa pelatihan formal manajemen pasar modern menggambarkan situasi di mana hardware sudah berstandar tinggi namun software masih konvensional. Kebijakan diskon sewa 50% untuk

UMKM menjadi insentif positif, namun keterbatasan anggaran operasional pascapembangunan berpotensi menghambat keberlangsungan pengelolaan optimal.

3. Disposisi

Temuan disposisi menyajikan narasi berlapis. Pada level institusional, komitmen pejabat Disperindag sangat positif dan proaktif, tercermin dari kebijakan diskon sewa UMKM dan prioritas alokasi kios bagi pedagang eks-Shopping Centre. Namun pada level pedagang, terdapat variasi disposisi yang signifikan. Penelitian mengidentifikasi konsep baru: 'disposisi pasif' suatu kondisi di mana pedagang memiliki minat beroperasi namun tidak berani mengambil keputusan aktif. Kondisi ini dibentuk oleh 'luka historis ekonomi' (historical economic wound) pascakebakaran 2018. Lima tahun berdagang dalam ketidakpastian membentuk psikologi pengambilan keputusan yang menghindari risiko bukan penolakan aktif terhadap kebijakan, melainkan ketakutan terhadap pengulangan kerugian masa lalu. Konsep 'disposisi pasif' ini merupakan kontribusi konseptual baru yang memperluas tipologi disposisi dalam Model Edward III, dari spektrum positif-negatif menjadi trikotomi aktif-pasif-negatif.

4. Struktur Birokrasi

Pengelolaan Pasar Modern Limboto melibatkan empat instansi utama (Disperindag, Dinas PUPR, Bapenda, dan Unit Pengelola Pasar) dengan kewenangan sektoral yang jelas dalam regulasi, namun tanpa mekanisme koordinasi lintas-sektor yang terjadwal dan terinstitusionalisasi. Kondisi ini berdampak pada lambatnya respons terhadap permasalahan operasional. Seorang pedagang menyampaikan: "Dari pertama kali mendaftar sampai akhirnya resmi bisa mulai berjualan, saya butuh waktu hampir sebulan penuh." Fragmentasi birokrasi tanpa koordinasi efektif ini menurunkan kepercayaan pedagang dan motivasi beroperasi secara aktif.

Tabel 1. Matriks Integrasi Implementasi Kebijakan dan Kesejahteraan Ekonomi Pasar Modern Limboto

Variabel (Edward III)	Capaian	Dampak Operasional	Implikasi Kesejahteraan
Komunikasi	Sedang	±50 kios belum aktif; gap informasi pedagang	Akses manfaat tidak merata; pedagang kecil lebih rentan
Sumber Daya	Asimetris (fisik baik; non-fisik sedang)	Infrastruktur memadai; SDM & sistem informasi terbatas	Produktivitas meningkat bertahap; UMKM terbantu diskon sewa
Disposisi	Baik di level pejabat; variatif pada pedagang	Komitmen pemerintah kuat; adaptasi pedagang beragam	Pedagang adaptif meningkat penghasilan; pedagang pasif stagnan

Struktur Birokrasi	Sedang	SOP tersedia; koordinasi lintas instansi belum optimal	Prosedur administratif memberatkan pedagang kecil

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Lokal

Perubahan Pendapatan Pedagang

Kondisi pendapatan pedagang bervariasi berdasarkan kelompok. Pedagang baru yang mampu beradaptasi mencatat kenaikan omzet 15–20% setelah bulan ketiga hingga keempat beroperasi (konsisten dengan temuan Sarajar et al., 2025 yang menetapkan periode adaptasi 6–12 bulan). Pedagang lama dari eks-Shopping Centre masih dalam proses pemulihan, dengan sebagian menyatakan pendapatan belum kembali ke level sebelum kebakaran.

Penyerapan Tenaga Kerja

Pasar Modern Limboto menciptakan lapangan kerja baik secara langsung (pedagang, petugas kebersihan, keamanan) maupun tidak langsung (pemasok, jasa transportasi, warung makan sekitar). Produsen lokal yang memasok produk ke pasar melaporkan peningkatan omzet produksi sekitar 30% dan penambahan karyawan.

Ekspansi dan Keberlanjutan UMKM

Dampak paling nyata terlihat pada UMKM yang mampu memanfaatkan ekosistem pasar. Seorang pengusaha kuliner khas Gorontalo melaporkan peningkatan omzet hampir dua kali lipat setelah bergabung dengan food court, disertai pendaftaran merek dagang dan proses sertifikasi halal. Model bisnis inovatif seperti jasa antar belanja berbasis pasar juga bermunculan, menunjukkan multiplier effect ekonomi yang melampaui dinding fisik pasar.

Aktivitas Ekonomi Lokal

Multiplier effect terhadap ekosistem ekonomi Kecamatan Limboto mulai terasa nyata. Pemilik warung makan sekitar melaporkan pertumbuhan usaha sejalan dengan ramai-tidaknya pasar. Angkutan kota rute Limboto mencatat peningkatan penumpang dan penambahan armada di hari-hari ramai. Pemerintah berencana mengintegrasikan pasar dengan terminal tipe B yang akan dibangun berdekatan, yang diproyeksikan semakin memperbesar multiplier effect ekonomi.

Pembahasan Teoritis

Penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi konseptual terhadap Model Edward III. Pertama, dalam konteks pembangunan baru (new development), komunikasi memiliki peran lebih fundamental dibanding konteks revitalisasi karena seluruh relasi pedagang-pengelola harus dibangun dari nol. Kedua, penelitian ini mengusulkan pengembangan Model Edward III dengan menambahkan 'konteks historis' sebagai variabel moderasi eksplisit dalam konteks pasca-bencana. Ketiga, konsep 'disposisi pasif' yang ditemukan memperluas tipologi disposisi Edward III dari spektrum positif-negatif menjadi trikotomi aktif-pasif-negatif. Intervensi terhadap disposisi pasif memerlukan pendekatan psikososial

yang komprehensif membangun kembali kepercayaan diri pedagang, bukan sekadar insentif finansial.

Temuan-temuan di atas juga dapat dikaitkan secara eksplisit dengan tinjauan literatur yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan. Pola 'kebocoran komunikasi' yang ditemukan pada variabel komunikasi selaras dengan argumen Edward III (1980) bahwa distorsi pesan antarjenjang birokrasi menjadi salah satu penyebab utama kegagalan implementasi, dan memperkuat temuan (Roring et al., 2021) bahwa efektivitas koordinasi lembaga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Kesenjangan hardware-software pada variabel sumber daya sejalan dengan temuan (Tabo, 2018) mengenai rendahnya kapasitas sumber daya aparatur sebagai kendala implementasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memperluas temuan tersebut ke konteks pengelolaan aset fisik berskala besar. Konsep 'disposisi pasif' yang ditemukan berbeda dari kajian revitalisasi pasar yang sudah lama beroperasi, seperti pada (Agustin et al., 2025) dan (Engkus, 2020), yang umumnya melaporkan resistensi aktif terhadap perubahan; dalam konteks pembangunan baru pascabencana, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan psikologis berupa trauma ekonomi lebih dominan dibandingkan penolakan aktif, sehingga memperkaya pemahaman teoretis mengenai variasi bentuk disposisi dalam Model Edward III. Sementara itu, fragmentasi struktur birokrasi yang teridentifikasi konsisten dengan pola yang dilaporkan Imanda dan Rusdarti (2020) pada program relokasi pedagang kaki lima, yang menekankan pentingnya mekanisme koordinasi lintas-instansi yang terlembagakan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembangunan Pasar Modern Limboto berada pada tahap perkembangan yang positif namun masih menghadapi tantangan pada semua variabel Edward III. Komunikasi terkendala oleh kebocoran informasi dan inkonsistensi pesan. Sumber daya menunjukkan kesenjangan hardware-software yang signifikan. Disposisi bersifat asimetris dengan temuan baru berupa ‘disposisi pasif’ yang dilatarbelakangi trauma historis. Struktur birokrasi masih fragmented tanpa mekanisme koordinasi lintas-instansi yang optimal.

Dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal mulai terasa positif: kenaikan omzet pedagang aktif 15–25%, penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, pertumbuhan UMKM lokal, dan multiplier effect terhadap ekosistem ekonomi Kecamatan Limboto.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan empat rekomendasi strategis: (1) Penguatan komunikasi dua arah melalui sistem informasi digital terintegrasi dan mekanisme verifikasi pemahaman pedagang secara berkala; (2) Investasi sumber daya non-fisik berupa pelatihan manajemen pasar modern bagi pengelola dan program fasilitasi permodalan UMKM yang terstruktur; (3) Pendampingan psikososial pedagang melalui program konseling dan pembinaan khusus bagi pedagang dengan ‘disposisi pasif’; dan (4) Reformasi koordinasi birokrasi melalui pembentukan tim koordinasi lintas instansi dengan

jadwal pertemuan tetap dan pengembangan sistem layanan terpadu satu atap (one-stop service) bagi pedagang.

Agar lebih aplikatif pada lokus penelitian, keempat rekomendasi tersebut secara operasional dapat diimplementasikan oleh Disperindag Kabupaten Gorontalo sebagai berikut. Pertama, sistem informasi digital terintegrasi dapat diwujudkan melalui aplikasi atau papan informasi digital di area Pasar Modern Limboto yang diperbarui langsung oleh Unit Pengelola Pasar, disertai verifikasi pemahaman pedagang melalui pertemuan kelompok pedagang triwulanan. Kedua, pelatihan manajemen pasar modern bagi pengelola dapat diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Gorontalo atau lembaga pelatihan Kementerian Perdagangan, dengan target seluruh staf Unit Pengelola Pasar tersertifikasi dalam waktu satu tahun anggaran; program fasilitasi permodalan UMKM dapat disinergikan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan mitra Pemkab Gorontalo. Ketiga, pendampingan psikososial bagi pedagang eks-Shopping Centre dengan 'disposisi pasif' dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan tenaga psikolog komunitas, berupa sesi konseling kelompok berkala yang secara khusus membangun kembali kepercayaan diri pascatrauma kebakaran 2018. Keempat, tim koordinasi lintas instansi (Disperindag, Dinas PUPR, Bapenda, dan Unit Pengelola Pasar) direkomendasikan dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Gorontalo dengan jadwal rapat koordinasi bulanan dan indikator kinerja terukur, seperti target penurunan waktu proses pendaftaran pedagang baru dari hampir satu bulan menjadi maksimal tujuh hari kerja serta peningkatan okupansi 50 kios yang masih belum aktif dalam kurun satu tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Adityanto, B., & Paselle, E. (2024). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(1), 45–60.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101.

Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *12*(2), 145–158.

Fadli, M. R. (n.d.). Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Paradigma, dan Teknik. –.

Indonesia, K. P. R. (2022). *Kebijakan Penguatan Ekonomi Lokal dan Pengembangan Pasar Modern*.

Riza, L., & Aditya, R. (2021). Modernisasi Infrastruktur Pasar dan Aktivitas Ekonomi Lokal. *International Journal of Development Studies*, *5*(3), 201–219.

Tabo, S. (2018). Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kantor Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, *1*(1), 47–56. https://doi.org/10.32662/gjpads.v1i1.178

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.

Agustin, A. F., Sari, S. R., Simbolon, M. M., & Arif, L. (2025). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Kembang Kota Surabaya). Jurnal Publik.

Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw I Kecamatan Sinonsayang. Jurnal Governance, 1(2).

Imanda, M. B., & Rusdarti, R. (2020). Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL

Kawasan Tlogosari Kota Semarang. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, 3(1), 616–624.

Hamid, N. A., & Hamka, H. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Pedagang Relokasi Pasar Tradisional Modern (Studi Kasus Pasar Tradisional Modern Kabupaten Maros). Jurnal Mirai Management, 7(2), 142–146.

Endrawanti, S., & Wahyuningsih, C. D. (2014). Dampak Relokasi Pasar: Studi Kasus di Pasar Sampangan Kota Semarang. Serat Acitya, 3(1), 78.

Widiyanti, N. L., & Octavia, D. I. (2024). Pengaruh Relokasi, Lama Usaha dan Modal Usaha terhadap Pendapatan UMKM (Studi Kasus Pedagang Shelter Manahan Solo). Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 724–735.

Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. Jurnal Sosiologi Islam.

Sarwoko, E. (2008). Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 4(2), 98.

Habli, S. H. A. J. M. (2020). Dampak Relokasi Pasar Tradisional bagi Pendapatan Pedagang di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 84–101.

Nurhayati, S., Rismawati, S. D., & Christianto, P. A. (2018). Kajian Pra Revitalisasi Pasar Berorientasi Kesejahteraan, Kenyamanan dan Keindahan (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan). Jurnal Litbang Kota Pekalongan.

Agustina, I. F. (2017). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Mix Use di Kecamatan Jabon. Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik (JKMP), 4(2).

Immanuel, M. (2023). Adaptasi Sosial dan Ekonomi Pedagang Sektor Informal Selama Masa Pandemi. Universitas Hasanuddin.